

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka perbankan nasional, seperti tertuang di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan cetak biru Pengembangan BPR, BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada mereka. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, kinerja dan kesehatan BPR menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan sektor perbankan, yang berpengaruh pada pertumbuhan sektor UMKM.

Dalam arahan Gubernur Bank Indonesia pada acara *Bankers' Dinner* disampaikan bahwa sudah saatnya untuk menempatkan sektor informal (seperti petani kecil di pedesaan, pedagang di pasar-pasar tradisional, penjual rokok dan pedagang warung kelontong) di barisan terdepan dalam penetapan kebijakan Bank Indonesia (*Putting the Last First*). Terkait dengan hal tersebut, serta dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor informal, peran dan kontribusi BPR sebagai ujung tombak lembaga keuangan daerah dalam pembiayaan sektor

informal tentunya menjadi sangat penting. BPR dianggap yang paling dekat dan paling mengetahui nasabahnya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah BPR mengalami penurunan. Sampai dengan Oktober 2011 jumlah BPR konvensional yang ada di seluruh Indonesia tercatat 1.669 unit, yang terdiri atas : BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas 1.388 unit; berbadan hukum Perusahaan Daerah 247 unit; dan Koperasi sebanyak 34 unit yang tersebar di 33 provinsi. Dibandingkan Oktober 2010, jumlah tersebut mengalami penyusutan sebanyak 37 unit, dimana jumlah keseluruhan BPR masih tercatat sebanyak 1.706 unit yang terdiri atas : BPR berbadan hukum PT 1.384 unit; Perusahaan Daerah 288 unit; dan Koperasi sebanyak 34 unit. Perubahan BPR berdasarkan badan hukumnya selama lima tahun terakhir diilustrasikan pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah BPR Konvensional

Tahun	Jumlah BPR Konvensional
2007	1.817
2008	1.771
2009	1.733
2010	1.706
2011	1.669

(Sumber : Statistik perbankan Indonesia 2011, diolah kembali)

Menyusutnya jumlah BPR tersebut umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu penggabungan usaha (*merger*) dan pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia. Dicabutnya izin usaha BPR oleh BI biasanya disebabkan karena adanya tindakan

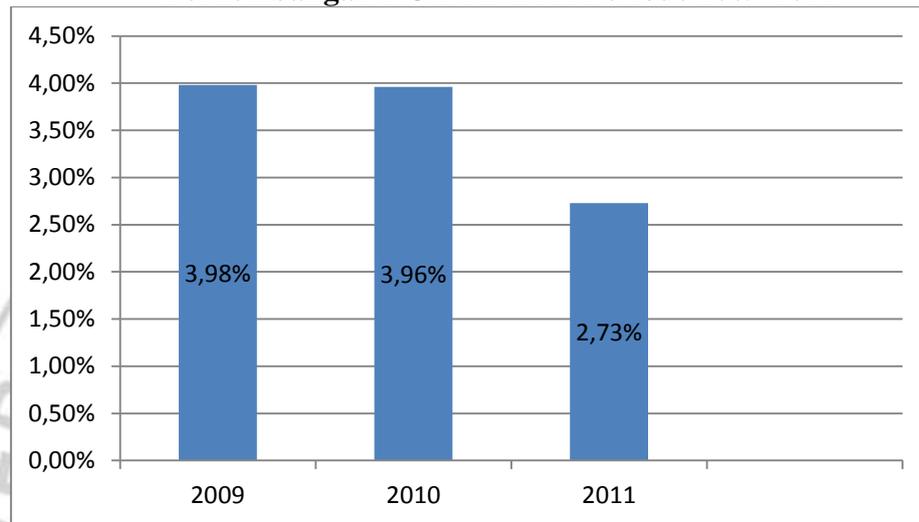
fraud (penipuan, kecurangan, penggelapan) atau pemilik tidak mampu memenuhi persyaratan permodalan.

Terkait dengan permodalan, BI mengeluarkan PBI N0.8/26/PBI tahun 2006 tentang BPR, yang mengatur pemenuhan jumlah modal disetor minimum per 31 Desember 2010. Jumlah modal disetor minimum tersebut antara lain : Rp 5 miliar untuk Wilayah DKI Jakarta; Rp 2 miliar untuk Ibukota Provinsi Jawa dan Bali; serta di Wilayah Kabupaten atau Kota Bogor dan Depok. Rp 1 miliar untuk BPR di Ibukota Provinsi di luar Jawa dan Bali, serta di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang telah disebutkan sebelumnya, Rp 500 juta untuk BPR di luar wilayah yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan catatan Direktorat Kredit UMKM dan BPR Bank Indonesia, sampai dengan pertengahan tahun 2010, duapuluh persen BPR di Indonesia belum dapat memenuhi modal disetor minimum tersebut (infobanknews.com, 2010). Untuk memenuhi ketentuan tersebut, pemilik BPR harus melakukan penambahan modal atau melakukan *merger*. Apabila kedua upaya tersebut tidak berhasil maka BPR akan ditutup. Penutupan BPR ini berdampak pada pencitraan negatif terhadap industri BPR dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Padahal, tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting bagi suatu bank, karena jika masyarakat sudah kurang percaya terhadap satu bank maka masyarakat akan enggan menyimpan dana pada bank tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh kinerja keuangan lembaga tersebut, karena jika semakin baik kinerja keuangannya masyarakat pun tidak akan ragu untuk mempercayakan dana yang

mereka miliki pada lembaga tersebut. Sebagai gambaran, berikut adalah data kinerja keuangan PD BPR, dalam hal ini adalah nilai ROA-nya :

Gambar 1.1
Perkembangan ROA PD BPR Periode 2009-2011



(Sumber : bi.go.id)

Selama tiga tahun terakhir, pencapaian nilai ROA tertinggi dari PD BPR terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 3,98%, setahun kemudian, angka ini turun menjadi 3,96%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,73%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan, khususnya perusahaan di sektor jasa keuangan seperti PD BPR adalah ukuran perusahaan. Menurut penelitian, semakin besar ukuran perusahaan akan semakin baik juga kinerja keuangannya. Hal ini disebabkan, karena semakin besar perusahaan jasa keuangan maka akan semakin mudah dan murah baginya untuk mendapatkan sumber pendanaan dan akan lebih efisien dalam perasinya. Selain itu, ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan

laba. Bank yang berukuran besar pada umumnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari pada bank yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran bank, maka akan semakin bagus kinerjanya. Salah satu indikator dari ukuran perusahaan adalah jumlah aset.

Selain faktor ukuran perusahaan, akhir-akhir ini organisasi bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aktiva berwujud, tetapi juga pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, organisasi bisnis semakin menitik beratkan pentingnya *knowledge assets* (Aset pengetahuan) sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud. Dengan adanya perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan pengetahuan (*knowledge management*) maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. Implementasi dari modal berbasis pengetahuan dan modal berbasis teknologi pada suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumberdaya lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran *knowledge assets* (aset pengetahuan) adalah *intellectual capital* (selanjutnya disingkat IC) yang menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi maupun akuntansi. Menurut Khani et al (2011 : 315), tujuan utama dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan adalah untuk menciptakan *value added*. Salah satu sumberdaya terpenting bagi

keberhasilan dalam proses penciptaan nilai adalah, *Intellectual Capital* (IC). Menurut Mavridis, IC dapat dipandang sebagai aset tak berwujud yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Sedangkan Rastogi (2000), menyatakan IC sebagai seluruh kemampuan organisasi untuk secara terus menerus menghadapi dan merespon tantangan yang ada maupun yang potensial secara kreatif dan efektif.

Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan IC adalah seluruh sumberdaya perusahaan, baik yang melekat pada perusahaan maupun SDM-nya, dan bermanfaat untuk menciptakan nilai, tidak hanya bagi perusahaan, pelanggan, tetapi juga bagi *stakeholder* lainnya.

Konsep modal intelektual telah mendapatkan perhatian besar berbagai kalangan terutama para akuntan. Fenomena ini menuntut mereka untuk mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual mulai dari cara pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan masih kurangnya studi modal intelektual di Indonesia, maka penelitian ini akan mencoba mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan pengukuran IC. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang komprehensif terhadap perkembangan pemikiran pengukuran modal intelektual serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan PD BPR di Jawa barat.

Penelitian ini berusaha mengukur pengaruh IC (diukur dengan menggunakan metode *The Value Added Intellectual Coefficient* atau VAIC™

yang dikembangkan oleh Pulic: 1998-2000) terhadap kinerja keuangan (yang diukur dengan *Return On Assets*) PD BPR di Jawa barat. Judul yang diambil penulis yaitu “**Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan PD BPR di Jawa Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *intellectual capital* PD BPR di Jawa Barat?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan PD BPR di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan PD BPR di Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *intellectual capital* terhadap Kinerja Keuangan PD BPR di Jawa Barat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui *intellectual capital* pada PD BPR di Jawa Barat.
2. Mengetahui Kinerja Keuangan PD BPR di Jawa Barat.
3. Mengetahui pengaruh *intellectual capital* terhadap Kinerja Keuangan pada PD BPR di Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan terarahnya penelitian melalui target dari tujuan yang telah digariskan, adapun kegunaan penelitian dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan mengenai *intellectual capital*.
2. Dapat memahami lebih jauh mengenai *intellectual capital* beserta unsur-unsur dan pengaplikasiannya pada PD BPR di Jawa Barat.
3. Dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan PD BPR di Jawa Barat.
4. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sekaligus sebagai bahan kajian serta masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan konsep dan teori yang dipaparkan dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak PD BPR agar lebih memperhatikan IC sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan kinerja keuangannya.